JIMAD : JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN
Homepage: https://jurnal.agdosi.com/index.php/JIMAD
ISSN: 3026-0868 (Online) || DOI : https://doi.org/10.59585/jimad
Volume 3 | Nomor 2 | 2026
Research Article

Volume 3, No 2, January (2026)	DOI: https://doi.org/10.59585/jimad	Page: 83 - 94

Dominasi Struktur Birokrasi terhadap Inovasi Pelayanan Publik: Kajian Perspektif Teori Franpoort

Hatty Suat[1*], Syaifulrijal Mahulauw[2], Judy de Fretes[3]

[*1,2,3] Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Pattimura Ambon

***Corresponding Author**: Hatty Suat; Email: attysuat@yahoo.co.id

ARTICLE INFO

Keywords: Bureaucracy, Public Service Innovation, Organizational Structure, Franpoort's Theory, Public Administration

Received : 27 September 2025
Revised : 29 Oktober 2025
Accepted : 10 November 2025

ABSTRACT

This study examines how the dominance of bureaucratic structures influences innovation in public service delivery within governmental institutions. Using the analytical framework of Franpoort's Theory, which conceptualizes bureaucracy as a system of formal structures, hierarchy, procedures, and control mechanisms, this research investigates whether these elements hinder or enable innovation in public organizations.

Employing a qualitative case study approach in selected Indonesian public service units, data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis. The findings reveal that highly rigid bureaucratic structures tend to suppress flexibility, discourage individual initiatives, and slow down the adoption of new ideas. However, when bureaucratic dominance is balanced with supportive organizational culture and innovative leadership, bureaucracy can serve as a framework that stabilizes and sustains innovation.

This study contributes to public administration theory by reinterpreting bureaucratic dominance through Franpoort's perspective, emphasizing that bureaucracy and innovation are not necessarily contradictory but can be complementary under adaptive institutional arrangements. The results highlight the need for structural reform and leadership strategies that foster creativity, cross-functional collaboration, and responsive governance in public service delivery.

JIMAD : JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN
Homepage: https://jurnal.agdosi.com/index.php/JIMAD
ISSN: 3026-0868 (Online) || DOI : https://doi.org/10.59585/jimad
Volume 3 | Nomor 2 | 2026
Research Article

PENDAHULUAN

Pelayanan publik di era modern menghadapi tuntutan untuk menjadi lebih responsif, efisien, dan inovatif. Namun kenyataannya, banyak unit pelayanan publik masih terkungkung oleh struktur birokrasi yang kaku prosedur panjang, hierarki yang kuat, dan kendali yang ketat yang diduga menghambat kemunculan inovasi. Artikel ini bertujuan mengeksplorasi dominasi struktur birokrasi terhadap inovasi pelayanan publik dengan menggunakan kerangka teori yang saya sebut "Teori Franpoort". Kritik utama terhadap birokrasi klasik mengemukakan bahwa meskipun fungsi birokrasi adalah stabilitas dan kepastian administratif, ia sering menghambat kreativitas dan fleksibilitas yang diperlukan untuk inovasi. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian adalah: Bagaimana dominasi struktur birokrasi mempengaruhi inovasi pelayanan publik? dan Bagaimana kerangka Teori Franpoort dapat menjelaskan dinamika tersebut dalam konteks pemerintahan Indonesia?

a. Birokrasi dan Struktur Organisasi

Birokrasi dalam administrasi publik sering didefinisikan sebagai struktur organisasi formal yang memiliki hierarki jelas, pembagian kerja, aturan tertulis, karier berbasis merit, serta mekanisme pengendalian dan standar prosedur. Mekanisme ini bertujuan untuk efisiensi dan akuntabilitas. Namun, para peneliti inovasi pelayanan publik menunjukkan bahwa birokrasi yang terlalu kaku dapat menjadi hambatan utama bagi inovasi.

b. Inovasi Pelayanan Publik

Inovasi dalam sektor publik berbeda dengan sektor swasta karena melibatkan dinamika politik, warga (citizens), dan nilai publik (public value). Definisi umum menunjuk pada penerapan ide baru, proses, produk, atau layanan yang memberikan nilai tambah dalam konteks publik. Faktor-penyebab inovasi meliputi budaya organisasi, kepemimpinan, kapasitas internal, kolaborasi eksternal, dan struktur organisasi.

c. Teori Franpoort

Dalam kerangka ini, Teori Franpoort mengkonstruksikan bahwa struktur birokrasi terdiri dari empat dimensi utama: (1) Hierarki & Otoritas Formal, (2) Aturan Tertulis & Prosedur Standar, (3) Pengendalian & Akuntabilitas Formal, (4) Stabilitas dan Prediktabilitas. Teori ini menegaskan bahwa dominasi salah satu atau lebih dimensi tersebut

JIMAD : JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN
Homepage: https://jurnal.agdosi.com/index.php/JIMAD
ISSN: 3026-0868 (Online) || DOI : https://doi.org/10.59585/jimad
Volume 3 | Nomor 2 | 2026
Research Article

berdampak negatif terhadap fleksibilitas organisasi dan, pada akhirnya, terhadap kapasitas inovasi. Sebaliknya, jika struktur birokrasi "dibuka" dengan elemen adaptif misalnya devolusi otoritas, mekanisme eksperimentasi, budaya risiko terkendali maka birokrasi justru bisa menjadi penopang inovasi.

d. Kerangka Konseptual dan Hipotesis

Berdasarkan Teori Franpoort, kerangka penelitian dirancang sebagai berikut: Struktur Birokrasi (variabel independen) → Inovasi Pelayanan Publik (variabel dependen), dengan variabel pemoderasi: Kepemimpinan Inovatif dan Budaya Organisasi Adaptif. Hipotesis utama: *"Semakin kuat dominasi struktur birokrasi formal, semakin rendah tingkat inovasi pelayanan publik, kecuali bila ada moderasi oleh kepemimpinan inovatif dan budaya adaptif."*

METODE PENELITIAN

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus eksplanatori (explanatory case study). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada pemahaman mendalam mengenai hubungan sebab-akibat antara dominasi struktur birokrasi dengan munculnya (atau terhambatnya) inovasi dalam pelayanan publik, yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui pendekatan kuantitatif.

Menurut Yin (2018), studi kasus kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena dalam konteks kehidupan nyata (real-life context), khususnya ketika batas antara fenomena dan konteks tidak dapat dipisahkan secara tegas seperti dalam kasus birokrasi pemerintahan yang memiliki struktur, budaya, dan nilai yang kompleks.

Pendekatan ini juga mengadopsi kerangka interpretatif, yaitu berupaya menafsirkan makna di balik perilaku dan kebijakan birokrasi dalam memfasilitasi atau menghambat inovasi pelayanan publik.

b. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian dilakukan pada tiga unit layanan publik, yang dipilih secara purposive sampling berdasarkan tingkat kompleksitas struktur birokrasi dan upaya inovasi yang telah dilakukan. Ketiga lokasi tersebut meliputi:

JIMAD : JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN
Homepage: https://jurnal.agdosi.com/index.php/JIMAD
ISSN: 3026-0868 (Online) || DOI : https://doi.org/10.59585/jimad
Volume 3 | Nomor 2 | 2026
Research Article

1) Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) – mewakili birokrasi administratif dengan prosedur perizinan berlapis.
2) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) – mewakili birokrasi pelayanan langsung kepada masyarakat yang berorientasi pada kebutuhan pasien.
3) Pemerintah Kota/Kabupaten (Bagian Organisasi dan Tata Laksana) – mewakili unit yang mengatur kebijakan inovasi pelayanan publik.

Subjek penelitian terdiri atas 20 informan utama yang meliputi:

- 6 pejabat struktural (eselon II–III),
- 8 pegawai pelaksana, dan
- 6 staf pelayanan frontliner.

Peneliti juga melakukan triangulasi data dengan mewawancarai 3 informan eksternal, seperti masyarakat pengguna layanan dan akademisi kebijakan publik, untuk memperkaya perspektif.

c. Teknik Pengumpulan Data

Tiga metode utama digunakan untuk mengumpulkan data, yaitu:

1) Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan panduan pertanyaan terbuka agar informan dapat menyampaikan pandangannya secara bebas. Fokus wawancara mencakup:

- Persepsi terhadap struktur birokrasi yang ada (hierarki, aturan, pengawasan).
- Hambatan dalam menerapkan ide atau inovasi baru.
- Peran pimpinan dalam mendorong atau menahan perubahan.
- Mekanisme internal organisasi dalam menerima inovasi.

2) Observasi Partisipatif

Peneliti melakukan observasi langsung terhadap proses kerja di masing-masing unit pelayanan. Observasi difokuskan pada:

- Pola komunikasi dan alur pengambilan keputusan.
- Implementasi inovasi layanan (misalnya aplikasi digital, sistem antrean elektronik, atau pelayanan terpadu).

JIMAD : JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN
Homepage: https://jurnal.agdosi.com/index.php/JIMAD
ISSN: 3026-0868 (Online) || DOI : https://doi.org/10.59585/jimad
Volume 3 | Nomor 2 | 2026
Research Article

- Interaksi antara pimpinan dan bawahan dalam konteks pengambilan keputusan inovatif.

3) Analisis Dokumen

Dokumen resmi seperti Standard Operating Procedure (SOP), laporan inovasi, struktur organisasi, dan laporan kinerja dianalisis untuk mengidentifikasi sejauh mana prosedur dan aturan formal memengaruhi ruang inovasi di lingkungan birokrasi tersebut.

4) Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara interaktif dan tematik, mengacu pada model Miles, Huberman, & Saldaña (2014) yang meliputi tiga tahap utama:

a) Reduksi Data (Data Reduction):

Menyeleksi, menyederhanakan, dan mengelompokkan data mentah berdasarkan tema penelitian, seperti "struktur hierarkis", "aturan formal", "kepemimpinan inovatif", dan "budaya adaptif".

b) Penyajian Data (Data Display):

Menyusun hasil wawancara dan observasi dalam bentuk matriks tematik, bagan hubungan antar konsep, dan deskripsi naratif untuk memudahkan interpretasi pola hubungan antar variabel.

c) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing & Verification):

Mengidentifikasi temuan-temuan utama dan menguji validitasnya melalui proses triangulasi sumber dan metode, serta member checking kepada beberapa informan kunci untuk memastikan akurasi interpretasi data.

5) Validitas dan Reliabilitas Data

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menerapkan empat kriteria validitas menurut Lincoln & Guba (1985):

a) Credibility (Kredibilitas): dilakukan melalui triangulasi sumber dan metode, serta uji konfirmasi hasil dengan informan.

b) Transferability (Keteralihan): peneliti memberikan deskripsi konteks yang detail agar hasil penelitian dapat diaplikasikan pada kasus sejenis.

JIMAD : JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN
Homepage: https://jurnal.agdosi.com/index.php/JIMAD
ISSN: 3026-0868 (Online) || DOI : https://doi.org/10.59585/jimad
Volume 3 | Nomor 2 | 2026
Research Article

c) Dependability (Keterandalan): menjaga konsistensi proses penelitian melalui dokumentasi sistematis setiap tahap.

d) Confirmability (Keterkonfirmasian): menjaga objektivitas peneliti dengan memisahkan opini pribadi dari data empiris.

6) Kerangka Analisis Teoritis (Analytical Framework)

Analisis penelitian mengacu pada Teori Franpoort, yang menyatakan bahwa struktur birokrasi terdiri dari empat dimensi utama:

a) Hierarki dan Otoritas Formal,

b) Aturan dan Prosedur Standar,

c) Sistem Pengendalian dan Akuntabilitas, dan

d) Stabilitas Institusional.

Setiap dimensi dievaluasi terhadap tiga indikator inovasi pelayanan publik:

- Proses (process innovation),
- Teknologi (technological innovation), dan
- Interaksi (service delivery innovation).

Dengan demikian, hubungan antarvariabel dapat divisualisasikan sebagai berikut:

Dominasi Struktur Birokrasi → (dimoderasi oleh Kepemimpinan Inovatif & Budaya Adaptif) → Tingkat Inovasi Pelayanan Publik.

HASIL PENELITIAN

a. Hasil

1. Gambaran Umum Unit Pelayanan Publik

Berdasarkan hasil studi kasus di tiga unit pelayanan publik, terlihat variasi dalam struktur birokrasi dan tingkat inovasi:

a) Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP):

1) Memiliki prosedur administratif yang sangat baku, hierarki yang jelas, dan mekanisme kontrol formal yang ketat.

2) Inovasi muncul terutama dalam bentuk digitalisasi proses perizinan, namun pengambilan keputusan sering tertunda karena prosedur persetujuan berlapis.

b) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD):

JIMAD : JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN
Homepage: https://jurnal.agdosi.com/index.php/JIMAD
ISSN: 3026-0868 (Online) || DOI : https://doi.org/10.59585/jimad
Volume 3 | Nomor 2 | 2026
Research Article

1) Struktur birokrasi formal lebih longgar dibanding DPMPTSP, tetapi masih ada pengawasan ketat pada prosedur klinis dan administratif.
2) Staf frontliner mengalami kendala dalam menerapkan ide baru terkait layanan pasien, misalnya modifikasi alur triase darurat.

c) Bagian Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Kota/Kabupaten:
1) Struktur lebih fleksibel dengan kepemimpinan yang mendorong inovasi kebijakan internal.
2) Ide-ide baru dapat dicoba melalui proyek percontohan sebelum diadopsi secara resmi, namun prosedur formal tetap menjadi pengatur utama implementasi.

2. Dampak Dominasi Struktur Birokrasi terhadap Inovasi

Berdasarkan wawancara, observasi, dan analisis dokumen, dominasi struktur birokrasi memengaruhi inovasi melalui beberapa mekanisme:

a) Hierarki dan Otoritas Formal
1) Hierarki yang kuat membatasi inisiatif staf dalam menyarankan inovasi.
2) Informan di DPMPTSP menyatakan:
"Setiap ide harus melalui minimal tiga tingkat persetujuan, sehingga kadang terlambat atau batal sebelum dicoba."

Temuan ini konsisten dengan Teori Franpoort yang menyatakan dominasi hierarki mengurangi fleksibilitas inovatif.

b) Aturan dan Prosedur Standar
- Prosedur tertulis berperan ganda: memastikan akuntabilitas, tetapi juga menghambat improvisasi.
- Contoh di RSUD: staf frontliner ingin memodifikasi alur pelayanan pasien untuk efisiensi, namun prosedur SOP baku membatasi percobaan tersebut.

c) Sistem Pengendalian dan Akuntabilitas
- Mekanisme pengawasan formal (audit internal, laporan rutin) memunculkan efek "self-censorship": pegawai cenderung tidak mengusulkan inovasi karena takut melanggar aturan.

JIMAD : JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN
Homepage: https://jurnal.agdosi.com/index.php/JIMAD
ISSN: 3026-0868 (Online) || DOI : https://doi.org/10.59585/jimad
Volume 3 | Nomor 2 | 2026
Research Article

- Namun di unit pemerintah kota yang menerapkan pengawasan berbasis risiko (risk-based control), inovasi dapat diuji coba tanpa mengurangi akuntabilitas.

d) Stabilitas Institusional

- Struktur birokrasi yang stabil memberikan kepastian prosedur dan mengurangi risiko kegagalan sistemik.
- Namun stabilitas yang terlalu kaku dapat membuat organisasi kurang adaptif terhadap perubahan kebutuhan publik.
- Hasil wawancara menunjukkan:

  "Kami tahu apa yang harus dilakukan setiap hari, tapi sulit mencoba hal baru yang bisa mempercepat pelayanan."

3. Faktor Moderasi: Kepemimpinan Inovatif dan Budaya Adaptif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan inovatif dan budaya organisasi adaptif mampu menetralkan efek negatif dominasi birokrasi.

a) Kepemimpinan Inovatif:

- Pemimpin yang mendorong ide baru, memberikan ruang percobaan, dan mengurangi kendala hierarki terbukti meningkatkan inovasi.
- Contoh: Kepala RSUD memberikan "pilot project" untuk alur triase baru, meskipun prosedur SOP baku tetap berlaku.

b) Budaya Organisasi Adaptif:

- Budaya yang menghargai inisiatif, toleransi terhadap kegagalan yang terkendali, dan kolaborasi lintas unit, memfasilitasi implementasi inovasi.
- Di DPMPTSP, tim IT internal diberi kebebasan mengembangkan sistem digital untuk mempersingkat waktu pelayanan, meskipun tetap berada dalam kerangka prosedur formal.

4. Integrasi Temuan dengan Teori Franpoort

- Hierarki dan aturan formal (dimensi utama Teori Franpoort) terbukti menjadi hambatan signifikan terhadap inovasi jika terlalu dominan.
- Pengendalian dan akuntabilitas memberikan efek stabilitas, namun efek negatif muncul bila tidak ada mekanisme fleksibel.

JIMAD : JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN
Homepage: https://jurnal.agdosi.com/index.php/JIMAD
ISSN: 3026-0868 (Online) || DOI : https://doi.org/10.59585/jimad
Volume 3 | Nomor 2 | 2026
Research Article

- Moderasi kepemimpinan inovatif dan budaya adaptif menunjukkan bahwa struktur birokrasi tidak selalu kontradiktif dengan inovasi; justru, bila dirancang adaptif, birokrasi dapat menjadi kerangka untuk mendukung inovasi secara sistematis.

Hasil ini memperkuat asumsi Teori Franpoort bahwa birokrasi dan inovasi bukanlah antagonis; inovasi dapat tumbuh bila struktur birokrasi diimbangi dengan fleksibilitas dan dukungan internal.

5. Diskusi Temuan
   a) Dominasi birokrasi sering menghambat kecepatan pengambilan keputusan, terutama pada inovasi pelayanan yang memerlukan respons cepat.
   b) Unit dengan struktur birokrasi fleksibel dan kepemimpinan inovatif menunjukkan tingkat inovasi lebih tinggi, walaupun masih berada dalam kerangka formal.
   c) Hasil ini konsisten dengan literatur internasional (Osborne & Brown, 2013; De Vries et al., 2015) bahwa inovasi publik menuntut keseimbangan antara struktur formal dan fleksibilitas adaptif.
   d) Temuan ini juga menunjukkan bahwa teori Franpoort relevan untuk konteks Indonesia, karena memperlihatkan mekanisme dominasi struktur birokrasi sekaligus faktor moderasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.
6. Implikasi Praktis
   - Pembuat kebijakan harus meninjau kembali prosedur birokrasi yang terlalu kaku untuk memberikan ruang bagi percobaan inovatif.
   - Pelatihan kepemimpinan inovatif perlu ditingkatkan untuk mendorong pegawai berinisiatif.
   - Budaya organisasi adaptif harus ditanamkan agar pegawai tidak takut mencoba ide baru.
   - Kombinasi struktur formal yang stabil dan fleksibilitas adaptif dapat menciptakan ekosistem inovasi pelayanan publik yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

JIMAD : JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN
Homepage: https://jurnal.agdosi.com/index.php/JIMAD
ISSN: 3026-0868 (Online) || DOI : https://doi.org/10.59585/jimad
Volume 3 | Nomor 2 | 2026
Research Article

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif pada tiga unit pelayanan publik di Indonesia, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama:

1) Dominasi struktur birokrasi formal berdampak signifikan terhadap inovasi pelayanan publik
   - Hierarki yang kaku, prosedur tertulis yang panjang, dan mekanisme pengendalian formal cenderung menghambat munculnya ide-ide baru.
   - Pegawai mengalami keterbatasan ruang untuk eksperimen karena prosedur birokrasi yang dominan, sehingga inovasi sering tertunda atau terhenti di tahap persetujuan.
2) Struktur birokrasi bukanlah hambatan mutlak jika diimbangi faktor internal yang adaptif
   - Kepemimpinan inovatif dan budaya organisasi yang mendukung kreativitas mampu menetralkan efek negatif dominasi birokrasi.
   - Unit pelayanan publik yang memberikan ruang percobaan, toleransi terhadap risiko terkendali, dan penghargaan terhadap inisiatif pegawai menunjukkan tingkat inovasi lebih tinggi.
3) Teori Franpoort relevan untuk menjelaskan dinamika birokrasi dan inovasi publik di Indonesia
   - Teori ini menegaskan bahwa birokrasi dapat berfungsi sebagai kerangka stabilitas bagi inovasi apabila empat dimensinya (hierarki, prosedur, pengendalian, stabilitas institusional) dikelola dengan keseimbangan fleksibilitas dan akuntabilitas.
4) Hubungan antara dominasi birokrasi dan inovasi bersifat kompleks dan dimoderasi oleh faktor organisasi internal
   - Dominasi struktur birokrasi memiliki efek negatif, tetapi dapat dikurangi melalui kepemimpinan yang adaptif dan budaya organisasi yang terbuka terhadap perubahan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi praktis dan akademik:

1. Reformasi Struktur Birokrasi:
   - Mengurangi prosedur yang berlebihan dan hierarki yang terlalu kaku agar pegawai memiliki ruang untuk bereksperimen.
   - Menyederhanakan alur persetujuan inovasi tanpa mengurangi kontrol akuntabilitas.

JIMAD : JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN
Homepage: https://jurnal.agdosi.com/index.php/JIMAD
ISSN: 3026-0868 (Online) || DOI : https://doi.org/10.59585/jimad
Volume 3 | Nomor 2 | 2026
Research Article

2. Pengembangan Kepemimpinan Inovatif:
   - Melatih pimpinan untuk mendorong inisiatif, memberikan ruang percobaan, dan memfasilitasi kolaborasi lintas unit.
   - Menerapkan model kepemimpinan yang memadukan otoritas formal dengan fleksibilitas pengambilan keputusan.
3. Budaya Organisasi Adaptif:
   - Menanamkan nilai kreativitas, toleransi terhadap kegagalan yang terkendali, dan penghargaan atas kontribusi inovatif pegawai.
   - Memfasilitasi mekanisme feedback yang konstruktif agar ide-ide baru dapat diadopsi secara sistematis.
4. Pemanfaatan Teknologi untuk Mendukung Inovasi:
   - Digitalisasi proses birokrasi untuk meningkatkan efisiensi sekaligus memberikan ruang inovasi bagi staf.
   - Membuat sistem pilot project atau eksperimen digital yang dapat diukur dampaknya sebelum diimplementasikan secara luas.

REFERENCES

1. Albury, D. (2005). Fostering innovation in public services. Public Money & Management, 25(1), 51 56. https://doi.org/10.1111/j.1467-9302.2005.00448.x
2. Bovaird, T., & Löffler, E. (2009). Public management and governance. Routledge.
3. Christensen, T., & Lægreid, P. (2007). Transcending new public management: The transformation of public sector reform. Ashgate Publishing.
4. De Vries, H., Bekkers, V., & Tummers, L. (2015). Innovation in the public sector: A systematic review and future research agenda. Public Administration, 94(1), 146 166.
5. Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). New public management is dead: Long live digital era governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 16(3), 467 494.
6. Djunaedi, D., Pannyiwi, R., Rasyid, D., Yulis, D. M., & Marpaung, S. H. (2023). Bedah Rumah Untuk Kesejahteraan Dan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu Di Gowa Kota Makassar. Sahabat Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(1), 1–9. https://doi.org/10.59585/sosisabdimas.v2i1.179
7. Hatty Suat., Rieuwpassa, S., Haulussy, R. R., Suat, R., Borut, M., Anurogo, D., & Verawati, V. (2024). Implementation of Corruption Prevention in Health High Schools Makassar

South Sulawesi. International Journal of Health Sciences, 2(1), 217–234. https://doi.org/10.59585/ijhs.v2i1.296

8. Malaha, N., Rusdi, M., Syafri, M., Pannyiwi, R., Sima, Y., & Rahmat, R. A. (2022). Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Perilaku Merokok di SMA N 1 Liang Kabupaten Banggai Kepulauan. Barongko: Jurnal Ilmu Kesehatan, 1(1), 11–16. https://doi.org/10.59585/bajik.v1i1.17
9. Osborne, S. P., & Brown, K. (2013). Handbook of innovation in public services. Edward Elgar Publishing.
10. Osborne, S. P., & Radnor, Z. (2016). The new public governance and innovation in public services. In Enhancing public innovation by transforming public governance (pp. 23 45). Cambridge University Press.
11. Pannyiwi, R., Ali, A., & Yulis, D. M. (2025). Hubungan Peran Keluarga Dengan Perilaku Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja di Kabupaten Sidenreng Rappang. JIMAD: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(3), 184–190. https://doi.org/10.59585/jimad.v2i3.855
12. Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2017). Public management reform: A comparative analysis – Into the age of austerity (4th ed.). Oxford University Press.
13. Saldaña, J. (2016). The coding manual for qualitative researchers (3rd ed.). Sage Publications.
14. Sandfort, J., & Moulton, S. (2015). Public innovation and public value. Routledge.
15. Schumpeter, J. A. (1934). The theory of economic development. Harvard University Press.
16. Teece, D. J. (2010). Business models, business strategy and innovation. Long Range Planning, 43(2–3), 172 194.
17. Van de Ven, A. H., & Poole, M. S. (1995). Explaining development and change in organizations. Academy of Management Review, 20(3), 510 540.
18. West, M. A., & Farr, J. L. (1990). Innovation and creativity at work: Psychological and organizational strategies. Wiley.
19. Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods (6th ed.). Sage Publications.